

## DAFTAR PUSTAKA

- Arina, M. M., Koleangan, R. A., dan Engka, D. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20 (3), 26-35.
- Azman, N., dan Farida, L. (2014). Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4 (2), 163-168.
- DJPK. (2021). Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Kementerian Keuangan*.
- Eger, R. J., McDonald, B. D., and Miller, D. R. (2017). Helpful local surtaxes? Florida and disadvantaged families. *Local Government Studies*, 43 (2), 170-193.
- Fajriana, D. (2022). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 1-16.
- Fitri, H. (2022). Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD. *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief*, 2(5), 1-2.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handaka, R. D. (2018). Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 2(1).
- Hariadi, S. Y., Hilendri, B. A., dan Ridhawati, R. (2024). Analysis of Potential Motor Vehicle Tax Opportunities and Motor Vehicle Title Transfer Fee Opsens: Study in Central Lombok Regency. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, Vol. 3, No. 3 : 481-496.
- Hilmiyah, F., Maretaniandini, S. T., dan Tsabita, Z. A. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 123-138.
- Indriani, N. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2017.
- Kitchen, H. S. (2016). Diambil kembali dari New Tax Sources for Canada's Largest Cites: What Are the Options?:

[https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/82858/1/imfg\\_perspectives\\_no15\\_newtaxsources\\_kitchen\\_slack\\_2016.pdf](https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/82858/1/imfg_perspectives_no15_newtaxsources_kitchen_slack_2016.pdf)

- Machfud, S., dan Djoko, R. (2018). A Study of Possible Imposition of Piggyback on Personal Income Tax and Payroll Tax for Provincial Government. *Conference Proceedings Jakarta Indonesia*, 506-519.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marlinda, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press.
- Nugroho, D. R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 *Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Provinsi Sumatera Barat.
- \_\_\_\_\_. Nomor 69 Tahun 2014 *Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Provinsi Sumatera Barat.
- Putri, D. G. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Samsat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sintang) Periode 2012-2018.
- Sanusi, A. (2023). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, S., dan Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 142-157.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Politik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.

\_\_\_\_ Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

\_\_\_\_ Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

\_\_\_\_ Nomor 35 Tahun 2023 *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 16 Juni 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Jakarta.

Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.

Wildan, M. (2021, Desember). Diambil kembali dari Opsen Pajak Kendaraan dan BBNKB Bisa Atasi Masalah Transfer Daerah: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/35471/opsen-pajak-kendaraan-dan-bbnkb-bisa-atasi-masalah-transfer-daerah>

Wulansari, P. (2023). Implementation Of Opsen On Regional Taxes As A Mechanism For Increasing State Revenue And Income Under The Applicable Legislation. *Unram Law Review*, 7(2), 141-149.

Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 554-569.